

Adrian Sutedi, S.H., M.H.

HUKUM KEUANGAN NEGARA



Penerbit



SINAR GRAFIKA

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003 diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini juga dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.

Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Buku ini dapat dijadikan referensi utama dalam memahami Hukum Keuangan Negara yang pembahasannya meliputi: Pengertian, ruang lingkup, kedudukan, prospek keuangan negara; pengelolaan keuangan negara dan APBN; pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan APBN; defisit dan inflasi APBN; serta tinjauan hukum pinjaman luar negeri.

ISBN 979-007-328-3



9 789790 073289

Hukum Keuangan Negara

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PEMAHAMAN KEUANGAN NEGARA	1
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003	1
B. Pengertian Keuangan Negara	10
C. Ruang Lingkup Keuangan Negara	50
D. Kedudukan Keuangan Negara dalam Bank Indonesia	54
E. Penghapusan Dana Nonbudgeter dalam Hukum Keuangan Negara	66
F. Prospek Hukum Keuangan Negara	69
BAB 2 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN APBN	76
A. Pengertian dan Ruang Lingkup APBN	76
B. Determinasi Kebijakan Anggaran Negara di Indonesia: Analisis terhadap Beberapa Rezim Pemerintahan	85
C. Perencanaan dan Penganggaran APBN Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003	93

D. Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara	100	BAB 5 TINJAUAN PINJAMAN LUAR NEGERI	348
E. Pengelolaan Keuangan Negara dan Upaya Perbaikannya	118	A. Pinjaman Luar Negeri Menurut Undang-Undang Dasar 1945	348
F. Peran DPR dalam Sistem Perencanaan Anggaran	159	B. Pinjaman Luar Negeri dalam Perspektif Ekonomi	359
G. Yuridiksasi Kerugian Keuangan Negara dan Lembaga yang Berwenang Menilai	163	C. Beberapa Pinjaman Luar Negeri	385
BAB 3 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN APBN	171	D. Peran Bappenas dalam Pinjaman Luar Negeri	388
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan	171	DAFTAR PUSTAKA.....	391
B. Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN	178	PROFIL PENULIS	403
C. Pengawasan Keuangan Negara sebagai Upaya Pencegahan Korupsi	187		
D. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vs Penyelamatan Keuangan Negara	198		
E. Pengawasan APBN oleh DPR, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat	220		
F. Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara	263		
G. Pelaporan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum di Bidang Keuangan Negara	268		
BAB 4 DEFISIT DAN INFLASI APBN	277		
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Defisit	277		
B. Pengertian dan Pemahaman Inflasi dalam Perspektif Teoretis	278		
C. Sebab-Sebab Terjadinya Defisit Anggaran Negara ...	298		
D. Penyebab Terjadinya Inflasi	301		
E. Dampak Defisit terhadap Ekonomi Makro	314		
F. Dampak Inflasi, Upaya Mengatasi, dan Pengendalian Inflasi	318		
G. Pembiayaan Defisit Anggaran	335		